

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pariwisata**

Istilah *tourism* atau pariwisata muncul dimasyarakat sekitar abad ke-18, khususnya sesudah revolusi industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata atau tour yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang ke luar tempat tinggalnya sehari-hari bersifat sementara dengan suatu alasan apa pun kecuali melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.

Menurut kamus Glosari Pariwisata Kontemporer istilah pariwisata berarti semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar atau asing yang datang dan pergi dari ke suatu tempat, daerah atau Negara yang segala sesuatunya ada hubungannya dengan

proses tersebut seperti transportasi, makan minum, akomodasi, objek menarik serta jasa pelayanan lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, bahwa “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini.”<sup>2</sup>

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai.<sup>3</sup> Pariwisata pada dasarnya merupakan aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.

---

<sup>1</sup>Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2009), 25.

<sup>2</sup>A.J. Muljadi, dan Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7-9.

<sup>3</sup>I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), 44.

## 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

---

<sup>4</sup>Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), 165.

<sup>5</sup>Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia, 2007), 2.

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>6</sup>

Marihot mengatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>7</sup>

James McMaster menyatakan bahwa retribusi didasari atas dua prinsip, yang pertama adalah "*benefit principle*" artinya mereka yang menerima kenikmatan langsung atas pelayanan yang ada harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip yang kedua yaitu "*ability to pay principle*" artinya pengenaan tarif retribusi sesuai dengan kemampuan dari wajib retribusi, jika penghasilannya rendah maka pembayarannya pun semakin rendah dan berbeda

---

<sup>6</sup>Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama, 166.

<sup>7</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

dengan yang tinggi penghasilannya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Ronald C Fisher, secara teoritis pengenaaan retribusi memiliki dua tujuan. Pertama, retribusi harus membuat wajib retribusi membayar harga sesuai dengan keputusan konsumsi mereka secara efisien. Kedua, pembayaran retribusi untuk mengurangi dari terkenanya pajak daerah.<sup>9</sup>

Dengan begitu, retribusi harus beroperasi sebagai pajak manfaat, dengan biaya individu tergantung baik pada manfaat (penggunaan) dan biaya administrasi. Aturan utama untuk efisiensi ekonomi mengharuskan manfaat marjinal sama dengan biaya marjinal.

## **2.1 Objek Retribusi**

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya sebagian jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak

---

<sup>8</sup>Levi Amos Hasudungan Silalahi, "Retribusi Terminal Baranangsiang Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor," (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, "Universitas Indonesia", Jakarta, 2008), 16.

<sup>9</sup>Levi Amos Hasudungan Silalahi, "Retribusi Terminal Baranangsiang Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor," 16.

dijadikan sebagai objek retribusi.<sup>10</sup> Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

#### 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

#### 3. Retribusi Perizinan

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam

---

<sup>10</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Pertama, 166.

rangka atas desentralisasi. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan tertentu.

Selain tiga jenis retribusi diatas, dapat pula ditetapkan jenis retribusi yang lainnya yang sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu dari daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.<sup>11</sup>

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retribusi Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retribusi

---

<sup>11</sup>Nur Indah Kurnia Sari, "Peranan Retribusi Obyek Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada Religi Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik)," (Skripsi, Fakultas Ekonomi, "Universitas Negeri Surabaya", Surabaya, 2014)

merupakan iuran yang dibebankan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama. Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah.<sup>12</sup>

## **2.2 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi**

Pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari nasional dan daerah. Pariwisata dikembangkan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

### **1. Memprioritaskan Pengelolaan**

Kabupaten Pandeglang memang memiliki banyak obyek dan daya tarik wisata yang ditawarkan dari mulai wisata pantai, wisata alam hingga wisata

---

<sup>12</sup>Ni Luh Sili Antari, "Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, 2003, 40.



buatan. Namun, pengelolaan wisata tersebut masih kurang ditekankan oleh pemerintah daerah yang dimana potensi wisata tersebut masih banyak yang dikelola oleh orang perorangan. Padahal pengelolaan dalam era ekonomi daerah merupakan tanggung jawab daerah dalam rangka percepatan pendapatan daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pemerintah daerah harus mempunyai rencana kewenangan untuk melaksanakan usaha pariwisata, memfasilitasi dan mempromosi wisata dan daya tarik wisata demi meningkatkan pendapatan daerah.

## 2. Adanya Pendanaan atau Penganggaran Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, perlu adanya dukungan dana baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Karena dengan adanya alokasi dana akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam pengembangan obyek wisata sehingga akan menarik para wisatawan.

## 3. Melakukan Promosi dan Pemasaran

Dalam pemasaran sering digunakan promosi dan publikasi dengan tujuan agar keberadaan suatu obyek wisata dapat diketahui oleh wisatawan atau calon wisatawan. Promosi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan diadakannya kegiatan promosi pariwisata maka akan bertambahnya jumlah kunjungan wisata ke suatu obyek wisata.<sup>13</sup>

Secara aktivitas kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berusaha mempengaruhi para

---

<sup>13</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, 61.

wisatawan untuk mengunjungi obyek dan daya tarik wisata.

### 3. Obyek Wisata

Destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Suatu tempat pasti memiliki batas-batas tertentu, baik secara aktual maupun hukum.<sup>14</sup>

Suatu tempat atau daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok berikut:

- a) *Adanya something to see*. Maksudnya adalah sesuatu untuk dilihat.
- b) *Adanya something to buy*. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.
- c) *Adanya something to do*. Maksudnya adalah sesuatu aktifitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

---

<sup>14</sup>I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 126.

Obyek dan daya tarik wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Pasal 4 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Obyek dan daya tarik wisata merupakan ciptaan tuhan yang Maha Esa, berupa keadaan alam serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata berupa hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata tirta tempat hiburan, dan lain sebagainya.

#### **4. Wisatawan**

Kata wisatawan berasal dari bahasa sangsakerta, dari asal kata “wisata” yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran “wan” yang berarti orang yang melakukan perjalanan

disebut *traveller*. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut *Tourist*.<sup>15</sup>

Menurut Soekadijo wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.<sup>17</sup>

Secara umum wisatawan menjadi bagian dari *traveller* atau *visitor*. Untuk dapat disebut sebagai wisatawan,

---

<sup>15</sup>Siti Yumsinah, "Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2015," (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam, "Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang, 2016), 21.

<sup>16</sup>Kadek Dewi Udayantini, I Wayan Bagia dan I Wayan Suwendra, "Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013," dalam *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Manajemen* Vol.3 Tahun 2015

<sup>17</sup>I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 13.

seseorang haruslah seseorang *traveller*, tetapi tidak semua traveller adalah tourist. Dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk melihat dan mengunjungi objek wisata dengan tujuan untuk menghibur diri ataupun rekreasi.

#### **4.1 Jenis-jenis Wisatawan**

Karena bentuk wisata perdesaan yang khas, maka diperlukan suatu segmen pasar tersendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berapa tipe wisatawan yang akan mengunjungi tempat wisata tersebut,<sup>18</sup> yaitu:

##### **1. Wisatawan Domestik**

Terdapat 3 jenis pengunjung domestik yaitu :

- a. Wisatawan atau pengunjung rutin yang tinggal didaerah dekat desa tersebut.
- b. Wisatawan dari luar daerah (luar kota atau luar provinsi) yang transit atau lewat dengan motivasi membeli kerajinan khas setempat.

---

<sup>18</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, 70.

- c. Wisatawan domestik yang secara khusus mengadakan perjalanan wisata ke daerah tertentu, dengan motivasi mengunjungi daerah pedesaan penghasil kerajinan secara pribadi.
2. Wisatawan Mancanegara
    - a. Wisatawan yang suka berpetualang dan berminat khusus pada kehidupan dan kebudayaan di pedesaan. Umumnya wisatawan ini tidak ingin bertemu dengan wisatawan lainnya dan berusaha mengunjungi kampung atau desa dimana tidak begitu banyak wisatawan asing.
    - b. Wisatawan yang pergi dalam group, pada umumnya mereka tidak tinggal lama di dalam kampung/desa dan hanya terkait pada hasil kerajinan setempat.
    - c. Wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi dan hidup didalam kampung/desa dengan motivasi merasakan kehidupan di luar komunitas yang biasa dihadapinya.

## 5. Pariwisata Dalam Islam

Pariwisata mencakup begitu banyak sektor seperti transportasi, jasa penyelenggaraan hiburan atau rekreasi, jasa perjalanan, penginapan dan lain sebagainya. Sehingga sektor pariwisata dapat menjadi bisnis yang menjanjikan dan cukup banyak diminati para pengusaha bahkan pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>19</sup> Pariwisata syariah sesungguhnya sudah lama berkembang di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri sejak berjalannya paket-paket wisata religi dalam bentuk wisata ziarah lalu wisata spiritual.

Henderson mengatakan bahwa pariwisata secara tradisional masih terkait erat dengan agama yang menjadi motif kuat untuk bepergian. Pada saat yang sama, bangunan-bangunan keagamaan, ritual, festival dan acara keagamaan menjadi daya tarik yang menarik bagi para wisatawan. Orang-

---

<sup>19</sup>Daus Syamsu, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata," (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam, "Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang, 2016), 40.



orang ini merasakan bahwa nilai-nilai dalam sistem keyakinannya terwakili oleh obyek wisata tersebut.<sup>20</sup>

Dalam konteks wisata syariah, banyak sekali obyek-obyek wisata di negeri ini maupun di dunia islam lainnya. Karena itulah, pengembangan wisata syariah merupakan keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Arah pengembangan pariwisata islam tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan dan kepuasan batin kepada para wisatawan pada umumnya maupun wisatawan muslim khususnya.<sup>21</sup>

Ada banyak dalil Al Qur'an yang berkaitan dengan pariwisata, berikut dalil-dalil normatif dalam islam tentang pariwisata :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

---

<sup>20</sup>Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya* (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), 43.

<sup>21</sup>Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, 45.

*“Katakanlah : “Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.*<sup>22</sup> (QS. Al-An’am: 11)

Saking pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi ini (melancong) dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah, Allah SWT mengulangi ayat yang nyaris sama di surah yang berbeda.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

*“Katakanlah : “Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”.*<sup>23</sup> (QS. An-Naml: 69)

Pada ayat pertama, Allah menganjurkan agar melakukan perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah ditimpa azab yang pedih. Pada ayat berikutnya, Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa terlahir dengan malang. Intinya,

---

<sup>22</sup>Tubagus Najib al-Bantani, Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010, Surat 6 : 11.

<sup>23</sup>Tubagus Najib al-Bantani, Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010, Surat 27 : 69.

melancong atau berwisata memiliki tujuan spiritual, yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan mengakui kebesarannya.

Wisata syariah memang sangat luas dan bukan sekedar wisata religi. Seperti disinggung bahwa wisata syariah adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Konsumennya bukan hanya orang islam, tetapi juga orang-orang Non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Didalam obyek wisata memang banyak restoran yang menyediakan makanan halal dan hotel yang menempatkan arah kiblat disetiap kamar, namun belum benar-benar mengaplikasikannya sesuai syariat islam. Wisata syariah bukanlah satu jenis pariwisata, dalam kasus pariwisata sekuler.

Namun, wisata syariah ini memperhatikan motif-motif dan nilai-nilai agama islam sehingga segala bentuk obyek wisata yang ditawarkan sampai berbagai jenis jasa pelayanan jasanya dipastikan sesuai dengan aturan-aturan yang islami

dan tidak melanggar larangan-larangan agama.<sup>24</sup> Adapun kriteria obyek wisata syariah yaitu :

1. Obyek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
2. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
3. Tersedia makanan dan minuman halal.
4. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Melakukan wisata dengan jenis apapun tidak dilarang, apalagi untuk menikmati keindahan yang telah Allah ciptakan. Ini terkait dengan kegiatan tafkir dan dzikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, dengan memperhatikan dan merenungkan ciptaan tersebut, seperti dalam Qur'an surah Ali-Imran ayat 191 berikut ini :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya*

---

<sup>24</sup>Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, 47.

*berkata): “ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.*<sup>25</sup> (QS. Ali-Imran: 191).

Sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah SWT yang senantiasa berpijak pada keseimbangan, yang berlimpah didunia ini, ia tidak boleh lupa kepada kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Sebagai wisatawan muslim, dalam perjalanan wisatanya tidak lupa akan meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Bahkan orang-orang mukmin kadang mengkaitkan perjalanan wisata dengan ibadah, yang dimana selalu mengutamakan ibadahnya ketika waktunya sudah tiba dibandingkan meneruskan kesenangan mereka. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan prinsip, tidak memberatkan apalagi membebankan. Islam selalu memberi kemudahan, tidaklah melarang orang melakukan perjalanan (wisata).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Tubagus Najib al-Bantani, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010, Surat 3 : 191.

<sup>26</sup>Kaelany HD, *Pariwisata Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Misaka Galiza, 2002), 75.

Seseorang yang beragama islam tentulah harus berlaku sebagai seorang muslim, begitupun wisatawan muslim ke manapun mereka pergi, dimana pun mereka berada muslim harus menegakkan karakter dan iman islamnya didalam diri. Hal inilah yang harus didasari oleh setiap pelaku bisnis wisata syariah. Sehingga dalam islam, wisatawan muslim itu tidak dilarang untuk megunjungi wisata atau berlibur selagi berwisata tidak melarang larangan-Nya.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah**

Jumlah obyek wisata dalam suatu daerah merupakan sarana yang dapat dikunjungi oleh wisatawan untuk berlibur. Datangnya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah didasarkan oleh banyaknya obyek wisata yang akan dikunjungi.<sup>27</sup> Hal ini dapat diketahui juga akan memberikan

---

<sup>27</sup>Eti Ibrianti, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Objek Wisata, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata di Kabupaten Lingga Periode 2011-2013," (Skripsi, Fakultas

dampak bagi pendapatan sektor pariwisata di daerah dimana dengan adanya jumlah obyek wisata yang banyak dan menarik maka akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata sehingga kontribusi yang diberikan kepada daerah pun akan meningkat.

Rantetadung juga menyatakan bahwa dengan adanya dukungan alokasi dana dari pemerintah akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata yang ada untuk menarik minat para wisatawan. Sehingga dengan obyek wisata yang banyak dan terpenuhinya sarana dan prasarananya, maka akan meningkatkan wisatawan yang berkunjung dan akan berdampak peningkatan terhadap pendapatan daerah.<sup>28</sup>

## **2. Hubungan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah**

Wisatawan yang datang mengunjungi suatu obyek wisata sudah pasti akan menggunakan sumber daya serta

---

Ekonomi, "Universitas Maritim Raja Ali Haji", Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 2015), 10.

<sup>28</sup>M. Rantetadung, "Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire," *Jurnal Agroforestri* Vol. VII No. 1 (Maret, 2012), 26.

fasilitas yang telah tersedia dan akan mengeluarkan biaya untuk membayarnya, yang akhirnya akan menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi para pengusaha sektor pariwisata.<sup>29</sup> Jika wisatawan yang datang ke destinasi tersebut sangat banyak, mengeluarkan sebagian banyak uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya, maka hal ini akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup>

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaanya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. pendapatan sektor pariwisata dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan.

---

<sup>29</sup>Daus Syamsu, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata," (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam, "Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang, 2016), 41.

<sup>30</sup>I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 184.



Nasrul juga menyatakan bahwa bahwa sumber pendapatan pariwisata tidak bisa lepas dari jumlah wisatawan karena majunya sektor pariwisata tergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung. Kedatangan wisatawan akan mendatangkan penerimaan bagi daerah terutama bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri akan memberikan devisa dalam Negara dan akan menguntungkan bagi daerah. Semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung maka akan memberikan dampak yang positif bagi pendapatan daerah.<sup>31</sup>

### **C. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Pleanggra di tahun 2012 dengan judul: “*Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

---

<sup>31</sup>Kadek Dewi Udayanti, I Wayan Bagia dan I Wayan Suwendra, “Pengaruh Jumlah Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Buleleng Periode 2010-2013,” *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* Vol. 3 tahun 2015.

jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.<sup>32</sup>

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Denny Cessario Sutrisno di tahun 2013 dengan judul: "*Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien positif dari jumlah obyek wisata adalah 1043949 yang berarti jika jumlah obyek wisata mengalami peningkatan sebesar 1 obyek wisata maka retribusi naik 1.043.949 rupiah. Koefisien positif dari jumlah hotel sebesar 53776,97 yang berarti apabila jumlah hotel mengalami peningkatan sebesar 1 unit maka retribusi naik sebesar 53.776,97 rupiah. Sedangkan koefisien positif dari PDRB sebesar 0,670079 yang berarti apabila PDRB wilayah mengalami peningkatan sebesar 1 maka retribusi naik sebesar 0,67 rupiah. Ketiga

---

<sup>32</sup>Ferry Pleanggra, "Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi* Vol.1 No.1, (Agustus, 2012)

variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan retribusi pariwisata.<sup>33</sup>

Penelitian lain juga dilakukan oleh Femy Nadia Rahma dan Herniwati Retno Handayani di tahun 2013 dengan judul: *“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 1997-2011”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah obyek wisata dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus.<sup>34</sup>

Penelitian terakhir dilakukan oleh Ida Bagus Agastya Brahma Wijaya dan I Ketut Suidiana di tahun 2016 dengan judul: *“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode*

---

<sup>33</sup>Denny Cessario Sutrisno, “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang* Vol.2 No.4, (November, 2013)

<sup>34</sup>Femy Nadia Rahma dan Herniwati Retno Handayani, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus,” *Jurnal Ekonomi* Vol. 2 No. 2, 2013

2009-2015". Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Di pihak lain terdapat pengaruh tidak langsung dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi obyek wisata dan merupakan variabel mediasi. Dari hasil analisis dapat disarankan bahwa hendaknya pemerintah Kabupaten Bangli lebih gencar melakukan promosi pariwisata agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.<sup>35</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas suatu pendapatan retribusi daerah dalam memanfaatkan obyek wisata yang ada. Sedangkan

---

<sup>35</sup>Ida Bagus Agastya Brahmana Wijaya dan I Ketut Suidiana, "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 5 No. 12

perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Ferry Pleangra menggunakan variabel independen Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita dalam mempengaruhi Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Periode 2006-2010. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Jumlah Obyek Wisata, meneliti tahun 2004-2016 dan studi di Kabupaten Pandeglang.
2. Penelitian Denny Cessario Sutrisno menggunakan variabel independen Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel dan PDRB dalam mempengaruhi Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2011. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Jumlah Obyek Wisata, meneliti tahun 2004-2016 dan studi di Kabupaten Pandeglang.
3. Penelitian Femy Nadia Rahma dan Herniwati Retno Handayani menggunakan variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan

Perkapita dalam mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 1997-2011. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Obyek Wisata, meneliti tahun 2004-2016 dan studi di Kabupaten Pandeglang.

4. Penelitian Ida Bagus Agastya Brahmama Wijaya dan I Ketut Sudiana menggunakan variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli Periode 2000-2015. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan, meneliti tahun 2007-2010, dan studi di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan perbandingan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah obyek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang tahun 2004-2016.

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan sebuah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran sementara dari permasalahan yang akan ditelaah.<sup>36</sup>

Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1.  $H_0$  : Jumlah obyek wisata dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang.  
 $H_a$  : Jumlah obyek wisata dan jumlah wisatawan diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang.
2.  $H_0$  : Jumlah obyek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang.

---

<sup>36</sup>Andi Supangat, *STATISTIKA: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*, (Jakarta: KENCANA, 2007), 293.

$H_a$  : Jumlah obyek wisata diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang.

3.  $H_0$  : Jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang.

$H_a$  : Jumlah wisatawan diduga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Pandeglang